

Analisis Penyertaan Modal Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada PT. Bank Kalsel Cabang Pelaihari

Irma Hariyani¹, Tuti Hermelinda²

¹Universitas Terbuka –irmahariyani@gmail.com

²Politeknik Raflesia– tutihermelinda@gmail.com

Abstrak—Pemerintah daerah dituntut untuk mengelola keuangannya sendiri secara mandiri dalam pengelolaan keuangannya, pemerintah menggunakan instrument Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Secara umum perkembangan Setoran Modal dan Deviden serta PAD dan juga persentase penerimaan Dividen dari Bank Kalsel terhadap Pos HPKDD selama periode 2018 sampai dengan periode 2022 mengalami kenaikan yang selaras dengan kondisi perekonomian secara global. Penurunan yang terjadi lebih disebabkan oleh adanya dampak secara global yang mempengaruhi semua sektor termasuk dunia perbankan. Namun secara keseluruhan kinerja PT Bank Kalsel terutama dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah sudah layak diapresiasi terutama dengan terus meningkatnya setoran modal yang secara langsung meningkatkan PAD dan sebagai bukti peningkatan kinerja bagi PT Bank Kalsel.

Kata Kunci —PAD, Modal, Kinerja Perbankan

Abstrak—*Regional governments are required to manage their own finances independently. In managing its finances, the government uses the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) instrument which is used as a tool to improve public services and community welfare. In general, the development of Capital Deposits and Dividends as well as PAD and also the percentage of Dividend receipts from South Kalimantan Bank towards HPKDD Posts during the 2018 period up to 2022 will experience an increase in line with global economic conditions. The decline that occurred was more due to a global impact that affected all sectors including the banking world. However, overall the performance of PT Bank Kalsel, especially in increasing Original Regional Income, is worthy of appreciation, especially with the continued increase in capital deposits which directly increases PAD and is proof of increased performance. for PT Bank Kalsel.*

Keywords— PAD, Capital, Banking Performance

1. PENDAHULUAN

Untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, setiap daerah memerlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penggalian potensi sumber dana daerah yang cukup untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan maupun otonomi daerah dimana untuk dapat melaksanakan pembangunan daerah diperlukan sumber dana yang tidak sedikit jumlahnya. Pemerintah daerah dituntut untuk mengelola keuangannya sendiri secara mandiri. Dalam pengelolaan keuangannya, pemerintah menggunakan instrument Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka pengembangan daerah agar dapat mandiri adalah Penyertaan modal. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah investasi langsung

adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh Pemerintah Daerah untuk membiaya ikegiatan usaha.Pasal 304 ayat (1) UU 23/2014 menyebutkan bahwa daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD, penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD, dan penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.Setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam perda tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah. Penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah daerah adalah investasi pada Badan Usaha dengan mendapatkan hak kepemilikan. Manfaat yang dapatkan dari investasi ini berupa 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu yang merupakan keuntungan bagi hasil investasi berupa dividen, 2) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu, 3) penyerapan tenaga kerja dan 4) adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat langsung dari investasi tersebut.

Selama ini Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah berpartisipasi dalam perkembangan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang merupakan Badan Usaha milik Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan melakukan penyertaan modal. Terakhir kali penambahan penyertaan modal ke Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dilakukan pada tahun 2023 yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Kepada Perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan. Dengan peraturan ini maka seluruh penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 138.693.264.631. Berikut ini merupakan data mengenai penyertaan modal dan dividen yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada periode lima tahun terakhir :

Tabel 1
Setoran Modal dan Dividen yang diterima Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 sampai 2022

Tahun	Penyertaan Modal	Dividen	Kepemilikan saham
2018	85.374.367.703	12.090.537.348	6,79 %
2019	85.374.367.703	4.875.963.913	6,79 %
2020	85.374.367.703	7.441.598.663	6,79 %
2021	85.374.367.703	9.461.741.668	6,79 %
2022	110.374.367.703	10.425.528.033	7,47 %

Sumber : Pemkab Tanah Laut, 2023

Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dari Tahun 2019 sampai dengan 2023 yang dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 sampai 2022

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah
1	2018	128.454.917.428
2	2019	169.786.229.529
3	2020	189.603.069.628
4	2021	206.135.630.695

5	2022	193.890.015.753
---	------	-----------------

Sumber : Pemkab Tanah Laut,2023

Tabel 3
Percentase Penerimaan Dividen dari Bank Kalsel
terhadap pos HPKDD 2018 sampai 2022

Tahun	HPKDD	Dividen	Percentase
2018	12.090.537.348	12.090.537.348	100%
2019	4.875.963.913	4.875.963.913	100%
2020	7.441.598.663	7.441.598.663	100%
2021	9.836.676.683	9.461.741.668	96%
2022	11.010.810.370	10.425.528.033	95%

Sumber : Pemkab Tanah Laut,2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDD) sebagian besar merupakan kontribusi dari penerimaan deviden PT. Bank Kalsel yang dimana dividen merupakan salah satu komponen pembentuk PAD itu sendiri. Mengingat pentingnya kontribusi HPKDD terhadap PAD, maka perlu dilakukan analisis terhadap perkembangan Setoran Modal dan Deviden serta PAD dan juga persentase penerimaan Dividen dari Bank Kalsel terhadap Pos HPKDD selama periode 2018 sampai dengan periode 2022.

a. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada pendahuluan maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan Setoran Modal dan Dividen yang diterima Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 sampai 2022 ?
2. Bagaimana perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 sampai 2022 ?
3. Bagaimana perkembangan Persentase Penerimaan Dividen dari Bank Kalsel terhadap pos HPKDD 2018 sampai 2022 ?

b. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan Setoran Modal dan Dividen yang diterima Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 sampai 2022.
2. Untuk mengetahui perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 sampai 2022
3. Untuk mengetahui perkembangan Persentase Penerimaan Dividen dari Bank Kalsel terhadap pos HPKDD 2018 sampai 2022.

Manfaat Penelitian adalah Manfaat dilakukannya penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi pihak Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai basis perumusan dan implementasi pelaksanaan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Selatan guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Bagi Bank Pembangunan Kalimanta Selatan dari hasil penelitian dapat diketahui kontribusi penerimaan dividen dari hasil penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Selatan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Laut sehingga PT. Bank Pembangunan Kalimantan Selatan akan semakin

meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan bisnis perbankan.

3. Bagi Masyarakat diharapkan hasil dari penelitian ini akan memberikan informasi dan berkontribusi dalam dunia pendidikan terutama untuk kalangan akademisi.

Tinjauan Pustaka terdiri dari sebagai berikut :

1. Penyertaan Modal Daerah Investasi didefinisikan oleh Jones (2014) sebagai komitmen pendanaan kedalam satu atau lebih aset yang dipegang untuk beberapa periode waktu mendatang. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen royalty, manfaat social dan /atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat .Investasi merupakan penanaman modal dalam Perusahaan dengan tujuan kekayaan Perusahaan bertambah. Penyertaan modal berperan penting pada tahap awal pembentukan Perusahaan karena dana dapat digunakan untuk Pembangunan dasar yang menunjang operasional perusahaan. Penyertaan modal oleh pemerintah daerah pada dasarnya merupakan bagian dari investasi dalam bentuk pemberian modal, baik penyertaan modal awal maupun penambahan modal dalam Upaya peningkatan kemampuan Perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya.Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah.Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk pendirian BUMD, penambahan modal BUMD dan pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain. Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. Apabila penyertaan modal dalam bentuk barang milik daerah maka dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal Daerah yang mananilai riil dimaksud diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pendapatan Asli Daerah Menurut (Mardiasmo; 2010)“ Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan Menurut (Mahmudi, 2012) “Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan disentralisasi Fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiscal terhadap pemerintah pusat”. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).Sebagai penyumbang pendapatan daerah, PAD menjadi penting keberadaannya, apalagi dengan keterbatasan dana perimbangan dari pemerintah pusat, di mana sumber dana dari pemerintah pusat pun sangat terbatas.merujuk kepada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana di pasal 285 disebutkan bahwa Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas (1) Pendapatan Asli Daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah, (2) pendapatan transfer dan (3) lain-lain pendapatan Daerah yang sah.Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan terhadap pendapatan masyarakat,untuk itu diperlukan Upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan Pembangunan dalam bidang perekonomian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan surplus keuangan daerah melalui Investasi dengan melakukan penyertaan modal kepada BUMD berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku.
3. Badan Usaha Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 disebutkan bahwa “Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah”. Menurut Arif Mulianta Ginting, Edmira Rivani, dan Juli Panglima Saragih (2018) BUMD adalah badan usaha yang dikelola, dibina, dan diawasi oleh pemerintah daerah, yang sebagian besar atau

keseluruhan modalnya berasal dari negara serta diambil dari pendapatan masing-masing daerah. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa BUMD merupakan salah satu instrumen pemerintahan yang memiliki peran penting dalam menjalankan serta mengembangkan perekonomian setiap daerah dan perekonomian nasional. Pendirian BUMD oleh pemerintah daerah (Pemda) merupakan salah satu cara untuk memenuhi pendapatan asli daerah tersebut. Pendirian ini merupakan usaha Pemda untuk menambah sumber pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Terdapat beberapa hal yang mendasari pendirian suatu BUMD, antaralain sebagai Langkah mengoptimalkan potensi ekonomi di daerah dalam Upaya menggali dan mengembangkan sumberdaya daerah dan memberikan *public services* (pelayanan masyarakat) dan profit motive (mencari keuntungan) serta sebagai cara dalam mencari sumber pendapatan lain di luar retribusi, pajak, dan dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan fungsi dari Pemda.

4. Dividen Pengertian deviden menurut Baridwan (2013) adalah bagian dari laba yang dibagikan kepada pemegang saham yang sebanding dengan jumlah lembar saham yang dimilikinya, deviden yang dibagikan perusahaan bisa tetap dan bisa mengalami perubahan dari deviden yang dibagikan sebelumnya. Jadi, jumlah laba yang dibagikan tergantung dengan seberapa besar jumlah laba yang didapatkan oleh perusahaan. Sedangkan menurut Stice et al (2010) Pengertian deviden adalah distribusi kepada pemegang saham suatu perusahaan secara proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham. Dividen adalah bagian dari laba atau pendapatan suatu perusahaan yang besarannya telah ditetapkan oleh direksi dan juga disahkan dalam rapat para pemegang saham yang nantinya akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham karena distribusi dividen tujuan utama dalam bisnis namun pembagian ini juga akan mengurangi jumlah laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan. Pada prakteknya Perusahaan memberikan dividen dengan jumlah yang relative stabil atau meningkat secara teratur, hal ini disebabkan oleh asumsi bahwa investor melihat kenaikan dividen sebagai suatu tanda baik bahwa Perusahaan memiliki prospek cerah, demikian sebaliknya dan investor sendiri lebih menyukai dividen yang tidak berfluktuasi (dividen yang stabil).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kuantitatif yaitu menggunakan data yang dinyatakan dengan angka yang merupakan data *time series*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa laporan keuangan periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 bertempat pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut. Penelitian ini menyajikan data berupa grafik dan menganalisis perkembangan Setoran Modal dan Deviden serta PAD dan juga persentase penerimaan Dividen dari Bank Kalsel terhadap Pos HPKDD selama periode 2018 sampai dengan periode 2022.

3. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

- a. Perkembangan Setoran Modal dan Dividen yang diterima Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 sampai 2022. Perkembangan Setoran Modal dan Dividen yang diterima Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 sampai 2022 disajikan dalam bentuk grafik dibawah ini.

Gambar 1

Perkembangan Setoran Modal dan Dividen yang diterima Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 sampai 2022



Sumber : Hasil Olah Data,2023

Hasil analisis menunjukkan jika perkembangan modal dan dividen secara signifikan masih menunjukkan perkembangan yang searah dengan kata lain kenaikan maupun penurunan deviden masih sejalan dengan kenaikan dan penurunan setoran modal. Setoran modal dan deviden ini mencapai titik terendah pada tahun 2019, hal ini disebabkan adanya pandemi Covid 19 dimana mempengaruhi hampir diseluruh sektor terutama dunia perbankan. Namun setoran modal dan deviden mengalami kenaikan dari tahun 2020 hingga tahun 2022 kembali mencapai titik yang sama dengan tahun 2018. Dengan kata lain Bank Pembangunan Kalimantan Selatan mampu membangun kembali kinrja akibat terdampak pandemi Covid 19.

- b. Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah(PAD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 sampai 2022. Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 sampai 2022 disajikan dalam grafik berikut.

Gambar 2
Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 sampai 2022



Sumber : Hasil Olah Data, 2023

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan adanya kenaikan PAD dari tahun 2018 hingga tahun 2021, namun terjadi penurunan di tahun 2022 dimana penurunan PAD dari tahun 2021 ke tahun 2022 adalah sebesar 5.94%.

- c. Perkembangan Persentase Penerimaan Dividen dari Bank Kalsel terhadap pos HPKDD 2018 sampai 2022. Perkembangan Persentase Penerimaan Dividen dari Bank Kalsel terhadap pos HPKDD 2018 sampai 2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 3

Perkembangan Persentase Penerimaan Dividen dari Bank Kalsel terhadap pos HPKDD 2018 sampai 2022



Sumber : Hasil Olah Data, 2023

Dari hasil analisis dapat dilihat perkembangan Penerimaan HPKDD dan deviden mengalami penurunan drastis pada tahun 2019 sebagai akibat dari Pandemi Covid 19, namun kembali mengalami kenaikan secara signifikan pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Untuk Persentase penerimaan Deviden dari Bank Kalsel terhadap pos HPKDD 2018 sampai 2022 dari tahun 2018 hingga tahun 2020 adalah sebesar 100% sedangkan tahun 2021 sebesar 96% dan tahun 2022 sebesar 95%. Penurunan dalam 2 tahun terakhir meski tidak signifikan namun bisa jadi disebabkan adanya penyelarasan situasi dan kondisi perekonomian secara global pasca Pandemi Covid 19.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, setiap daerah memerlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber daya yang ada di daerahnnya masingmasing guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penggalian potensi sumber dana daerah yang cukup untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan maupun otonomi daerah dimana untuk dapat melaksanakan pembangunan daerah diperlukan sumber dana yang tidak sedikit jumlahnya. Pemerintah daerah dituntut untuk mengelola keuangannya sendiri secara mandiri. Dalam pengelolaan keuangannya, pemerintah menggunakan instrument Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Secara umum perkembangan Setoran Modal dan Deviden serta PAD dan juga persentase penerimaan Dividen dari Bank Kalsel terhadap Pos HPKDD selama periode 2018 sampai dengan periode 2022 mengalami kenaikan yang selaras dengan kondisi perekonomian secara global. Penurunan yang terjadi lebih disebabkan

oleh adanya dampak secara global yang mempengaruhi semua sektor termasuk dunia perbankan. Namun hal ini bukan berati Bank Pembangunan Kalimantan Selatan tidak melakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan kinerja perbankan. Mengingat situasi perekonomian yang dapat berubah dan tidak dapat diprediksi, maka sebagai salah satu pelaku dalam dunia perbankan, Bank Pembangunan Kalimantan Selatan harus tetap waspada dan bersiap diri terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki, (2015). *Intermediate Accounting*, Edisi Delapan, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Dian Budi Susanti, Sri Rahayu, Siska P Yudowati.(2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014. *E-Proceeding of Management. Vol 3(3) ISSN: 2355-9357. Di akses 5 Maret 2018, dari*
- Eko Diyah Nurkhayati. (2022). ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO. *JABE (Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi)*, 11(01).Retrieved from <http://www.jurnal.stas.ac.id/index.php/jabe/article/view/60>
- Faiza Rahma Dita, Indrawati Yuhertiana. (2023) Analisis Penyertaan Modal Daerah dan Kontribusi Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik dengan Return on Equity (RoE) sebagai Variabel Intervening *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 2023. Hlm. 4928-4940 P-ISSN: 2964-7231, E-ISSN: 2614-3658 DOI: <https://doi.org/10.24815/jims.v8i4.26960>
- Fernie Lydia Toar, Daisy S.M. Engka,Mauna Th.B. Maramis.(2023) ANALISIS PENGARUH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS PT. BANK SULUTGO)
Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol 24. No 1 (2023)
- Hasmiati Wa Ode, (2010). Analisis Tingkat Kemandirian Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pada Pemerintah Kabupaten Wakatobi. Desentralisasi Tidak Diterbitkan: Kendari Fakultas Ekonomi Universitas Haluoleo.
- Jones, G.R. (2013). *Organizational Theory, Design, and Change*, 7th Edition. London: Pearson Education Limited.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* Edisi 3 Cet 2. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah investasi langsung
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
- Stice, Stice, Skousen. (2010). *Akuntansi Keuangan*, Buku I Edisi 16. PT Raja Jakarta: Grafindo Persada.

Utri Dianniar (2023). ANALISIS KONTRIBUSI BUMD TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PONTIANAK *ABDI EQUATOR Vol 3, Maret 2023* Doi:
<http://dx.doi.org/10.26418/abdiequator.v3i1.67382>